

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya pengukuran kinerja (*performance indicator*) Instansi Pemerintah telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia sejak dikeluarkannya Inpres 7/1999. Evaluasi penyelenggaraan pada tingkat Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa di tingkat pemahaman telah memperlihatkan pengembangan yang cukup memadai meski belum secara signifikan. Akan tetapi di sisi penerapannya masih sangat lemah khususnya pada identifikasi penyusunan tolok ukur kinerja dan penetapan sasaran.

Rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun 2009 menyatakan bahwa pada Dinas Pendapatan belum terjadinya optimalisasi kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada Dinas Pendidikan masih harus mengoptimalkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan SMK serta penataan kelembagaan sekolah demi optimalisasi manajemen sekolah, kepada Bappeda direkomendasikan untuk membuat skala prioritas yang jelas dalam penyusunan rencana pembangunan agar alokasi anggaran mendahulukan masalah kota yang krusial dibandingkan dengan hal yang tergolong sekunder, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dianggap masih belum terwujudnya sistem pencatatan data asset yang

akurat dan lengkap, dan rekomendasi-rekomendasi lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja seluruh SKPD di Kota Bandung. (www.bandung.go.id)

Hasil kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung pada program wajib pendidikan yang dibawah Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat diukur pada pada masing-masing sasaran yang didasarkan pada indikator sasaran yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1.1
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Dinas Pendidikan
Kota Bandung Tahun 2010

Indikator Sasaran	Hasil Pencapaian
a. Meningkatkan akseibilitas dan mutu pendidikan menuju standar nasional:	
1. Meningkatkannya kualitas penyelenggaraan pendidikan	98,92%
2. Tersedianya SDM cerdas sejak dini.	100%
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas akses penyelenggaraan pendidikan dasar (SD/MI, dan SMP/MTs), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus sekolah.	99,50%
4. Meningkatnya akses layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.	100%
5. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan non formal.	100%
b. Meningkatkan pendidikan berkarakter (<i>character building</i>) menuju akhlak mulia: meningkatnya SDM yang kreatif dan kompetitif .	100%
c. Meningkatnya kualitas sekolah menuju sekolah sehat dan sekolah berwawasan lingkungan.: meningkatnya kualitas lingkungan sekolah.	100%
d. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan :	
1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan.	90%
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasaran penunjang pendidikan (laboratorium, perpustakaan, ruang kepala sekolah dan guru, sanitasi sekolah, dll).	100%
e. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas : meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.	100%
f. Meningkatkan <i>Good Governance</i> melalui manajemen pendidikan yang akuntabel dan transparan: meningkatnya kualitas pelayanan di bidang pendidikan.	100%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2010

Pada aspek kesehatan dapat dilihat dari pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (77,56%), persentase kelurahan yang mencapai *Universal Child*

Immunization (UCI) baru 46 kelurahan (30,67%) persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani kurang dari 24 jam (24 kelurahan), persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe (87,19%), persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif (20,66%), persentase murid SD/MI yang mendapat pemeriksaan gigi dan mulut (45%), persentase pekerja yang mendapat pelayanan kesehatan kerja, serta persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan yang baru mencapai 34,42%.

Lahirnya peraturan-peraturan baru dibidang pengelolaan keuangan Negara seperti Undang-undang nomor 17/2003 dan undang-undang nomor 1/2004 menjadi dasar bagi institusi Negara mengubah pola administrasi keuangan menjadi pengelolaan keuangan Negara. Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan berupa tata kelola pemerintah yang baik (*good government governance*), pemerintah terus melakukan perbaikan. Salah satu adalah dengan melakukan perbaikan dalam manajemen keuangan publik dalam bentuk perbaikan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan publik. Menurut Budi S. Purnomo (2009:3) dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah secara baik dapat dilakukan dengan melakukan perlindungan asset fisik dan finansial dengan mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus.

Menurut Walikota Bandung Dada Rosada adanya peraturan baru mengenai pengelolaan keuangan daerah sejak diberlakukannya PP No 58 Tahun 2005 dan Permendagri No 13 Tahun 2006 memberi motivasi untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang berbasis prestasi kinerja, sehingga setiap SKPD akan memiliki tanggungjawab untuk mengelola keuangan secara efektif, efisien,

ekonomis, transparan, dan akuntabel serta menghasilkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu contoh Pengelolaan Keuangan SKPD Kota Bandung dapat dilihat dari pengelolaan anggaran pada Dinas Pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 (belanja langsung dan belanja tidak langsung) berjumlah Rp. 1.006.882.830.504,10 termasuk di dalamnya dana yang bersumber dari APBN, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 46.360.100.000,- Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) sebesar Rp. 3.868.000.000,-, termasuk di dalamnya belanja tidak langsung dana tunjangan profesi guru sebesar Rp. 84.446.253.600,- dan tambahan penghasilan guru PNS sebesar Rp. 68.338.950.000,-, serta dana yang bersumber dari APBD Propinsi Jawa Barat (Bantuan Propinsi) sebesar Rp. 18.261.469.097,- dengan total capaian realisasi kinerja penggunaan anggaran sebesar Rp. 944.204.632.122,- atau 93.78 %. (LAKIP Disdik 2010)

Tantangan global yang dihadapi dunia tidak dapat dihindari baik dari sektor pemerintah maupun swasta, mau tidak mau semua pihak dituntut untuk mempersiapkan diri untuk mampu bertahan dalam menghadapi kondisi tersebut. Seiring dengan globalisasi ini, standarisasi manajemen telah menjadi isu utama, lebih khusus lagi standarisasi tentang manajemen mutu atau *Total Quality Management* yang selanjutnya disingkat TQM. Untuk itu, suatu lembaga baik pemerintah maupun swasta perlu menyiapkan kerangka sistem mutu lembaganya ke arah yang diinginkan sesuai dengan sasaran atau tujuan akhir yang ditetapkan oleh lembaga tersebut, dalam pengertian bahwa tujuan atau sasaran mutu dari

suatu lembaga mampu mencapai kesesuaian dengan keinginan yang diharapkan dari pelanggan atau mitra kerja lembaga tersebut.

Latar belakang mengapa diperlukannya TQM untuk meningkatkan kinerja dimulai dari terjadinya fenomena bahwa Amerika mulai kehilangan pasarnya dan produktivitasnya tertinggal dari Jepang, tingkat penganggurannya meningkat dalam sektor manufaktur, dan posisi kompetitifnya semakin terkikis dalam pasar global. Semua ini merupakan gejala penurunan sektor industri Amerika. Para pesaingnya terutama Jepang telah merebut banyak pasar yang sebelumnya didominasi Amerika. Persaingan global dalam sektor industri pada saat itu memperlihatkan bahwa Amerika pada decade 1980-an lebih memfokuskan pada upaya mengiklankan produknya secara lebih intensif dan lebih baik sementara para pesaingnya menekankan pada usaha meningkatkan kualitas produknya. Pada saat Amerika terlambat menyadari bahwa untuk memenangkan pasar global perlu penekanan lebih besar pada kualitas daripada pemasaran, gerakan *Total Quality Management* (TQM) muncul dan memberikan harapan perbaikan.

Menurut Fandi dan Anastasia (2001) salah satu kunci sukses agar dapat bersaing di pasar global adalah kemampuan untuk memenuhi atau melampaui standar-standar yang berlaku. Salah satu standar yang paling penting adalah ISO 9000, yang dihasilkan oleh *Internastional Organization for Standardization* di Jenewa, Swiss. ISO 9000 yakni sekumpulan standar sistem kualitas universal yang memberikan kerangka yang sama bagi jaminan kualitas yang dapat dipergunakan di seluruh dunia.

Berdasarkan Perda No. 09 Tahun 2009 tentang RPJMD tahun 2009-2013 menyatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja yang bersifat standar mutu menggunakan ISO series berguna untuk menyusun pedoman kerja yang standar, meningkatkan citra, profesionalitas, dan meningkatkan daya tarik investasi. Berdasarkan website resmi Pemerintah Kota Bandung (www.bandung.go.id) sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 ini sudah ada 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD (termasuk Dinas, Lembaga Teknis, dan Kecamatan) yang mendapatkan sertifikasi ISO dari 60 SKPD yang ada di Kota Bandung. SKPD Kota Bandung telah menerapkan manajemen mutu ISO dengan mengadopsi prinsip-prinsip *Total Quality Management* (TQM) demi meningkatkan mutu pelayanan pemerintah. Penerapannya tersebut berbentuk ISO series. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nursya'bini (2005) TQM dengan ISO memiliki kaitan yang erat. Kebanyakan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip ISO pada saat yang bersamaan juga mengadopsi prinsip-prinsip TQM. Banyak ahli manajemen kualitas yang berpendapat bahwa penerapan ISO merupakan langkah awal penerapan TQM. Pandangan ini kemudian dikenal sebagai pandangan optimis. Dalam Gotzamani dan Tsotras (2001) dalam Nursya'bani (2005) disebutkan bahwa menurut pandangan optimis meskipun ISO 9000 dengan TQM ada perbedaan, namun implementasi ISO merupakan langkah awal menuju TQM.

Penelitian tentang pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja pernah dilakukan sebelumnya oleh Abdul Rohmah (2009), hasil penelitian membuktikan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja

Pemda. Penelitian lain yang dilakukan oleh Natalia (2010) juga membuktikan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Tegal.

Secara empiris Penelitian mengenai penerapan TQM belumlah konsisten, seperti penelitian yang dilakukan oleh Zulaika (2008) yang melakukan penelitian tentang pengaruh TQM terhadap kinerja manajemen pada PT PP Lonsum Indonesia Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TQM berpengaruh pada kinerja manajemen secara simultan. Tetapi jika dilihat secara parsial, sub variabel dari TQM yaitu fokus pada pelanggan serta pendidikan dan pelatihan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kinerja manajemen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hariati (2010) tentang pengaruh penerapan TQM terhadap kinerja manajerial pada PT Pantja Surya dan hasil penelitian menunjukkan bahwa TQM secara simultan maupun parsial tidak berpengaruh pada kinerja manajerial pada PT Pantja Surya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan *Total Quality Management* (TQM) dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan kali ini adalah tempat penelitian yang dipilih. Penelitian tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pada penelitian terdahulu dilakukan di Pemda Jawa Tengah sedangkan penelitian ini dilakukan di Pemkot Bandung. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh TQM terhadap kinerja dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur ataupun BUMN sedangkan pada penelitian ini adalah

seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung. Permasalahan tersebut diangkat dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan *Total Quality Management* (TQM) terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung” (studi pada seluruh SKPD yang telah mendapatkan sertifikasi ISO).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dari fenomena yang terjadi, maka dapat ditarik rumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Secara simultan bagaimana pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan *Total Quality Management* (TQM) terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung.
2. Secara parsial bagaimana pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan *Total Quality Management* (TQM) terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan *Total Quality Management* (TQM) terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung secara simultan.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan *Total Quality Management* (TQM) terhadap Kinerja Secara parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Aspek Akademis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri disamping menambah wawasan dan ilmu sang penulis serta mendapatkan pengalaman sangat berharga ketika melalui proses penelitian hingga akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan khususnya pada masalah yang diangkat yaitu “Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan penerapan *Total Quality Management* (TQM) Terhadap Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung”.

2. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengangkat masalah yang serupa dengan lebih baik lagi.

b. Aspek Praktis

Dapat menjadi masukan kepada seluruh SKPD Kota Bandung sehingga kualitas pelayanan publik dengan mempertahankan sertifikasi ISO yang telah diduplikasinya dapat terus meningkat secara signifikan. Dengan penelitian ini juga dapat menjadi pemacu untuk SKPD meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerjanya di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung agar menjadi lebih baik.